

Diterbitkan Oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M)
Institut Pertanian Malang Bekerja Sama dengan Beberapa Organisasi
Profesi Bidang Pertanian dan Lembaga-Lembaga Penelitian Serta Perguruan Tinggi Negeri
dan Swasta Seluruh Indonesia

Redaksi

Ketua Dewan Redaksi

Prof.Dr. Ir. Soemamo DS, MS

Redaksi Pelaksana

Drs. Ahmad Sofwani, MSi

Penyunting Pelaksana

Ir. H. Sarwiyono, M.Agr, Sc
Ir. Wrwiek Ruminarti, MS
Ir. Siti Farida, MP

Ir. Agus Sukamo, MP
Ir. Niniek Dyah, MS
Ir. Kemas Yusra, MP

Dewan Redaksi (Mitra Bestari)

Prof. Dr.Ir. Hj. Siti R. Ch. Sy (Unibraw)
Prof. Dr.Ir. Syekhfani (Unibraw)
Prof. Dr.Ir. Gunawan (UGM)
Prof. Dr.Ir. Had Bowo, MS (UPN)
Prof. Ir. Semeru Ai . M.Agr. PhD (Unibraw)
Dr. Ir. Hj. Liliek Agustina, MS (Unibraw)
Dr. IrTitik Sundari, MS (Balitkabi)
Dr. Q. Dadang Emawanto, MS (BPTP)

Prof. Dr.Ir. H. Syamsul Bahri (Unibraw)
Dr. Ir. All Kabul (Unila)
Prof. Dr. Ir. Setyabudi (UWK)
Prof. Dr. Ir. HM. Muslich M. MSc. (Unibraw)
Prof. Dr. Ir. H. Tri Susanto. M. Agr.
(Unibraw)
Ir. Sukoso, PhD (Unibraw)
Dr. Akhmad Ghazali, MS (Unlam)

Alamat Penyunting dan Redaksi Jumal Pelaksana Lembaga Penelitian Dan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Institut Pertanian Malang Jl. Sukamo-Hatta Malang Telp (0341) 495541 Fax. (0341) 485539. Langganan Setahun Rp. 250.000,- + Ongkos Kirim Rp. 50.000,-Uang Langganan Dikirim ke Redaksi Pelaksana : Drs. Ahmad Sofwani, MSi. Telp. 08123575333

Agritek diterbitkan Oleh Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Institut Pertanian Malang bekerja sama dengan beberapa organisasi profesi bidang pertanian dan lembaga-lembaooa penelitian serta perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia di bawah Tim Pengembangan Jumal Institut Pertanian Malang dengan Ketua: Prof. Dr. Ir. Soemarno DS, MS Pelindung: Ir. RB. Ainurrasjid, MS. Penanggung Jawab: Redaksi Pelaksana. Telp/Fax. (0341) 824644

Jumal Agritek Tahun 2011 terbit 3 kali pada bulan Januari, Mei, dan September. Jumal Agritek terbit atas kontribusi artikel-artikel hasil penelitian dosen, peneliti, mahasiswa S1, S2, dan S3 di perguruan-perguruan tinggi negeri maupun swasta maupun lembaga-lembaga penelitian seperti Balitkabi, BPTP, Balittas, Balitro, Balitvet, dan lain-lain, dalam rangka pengembangan jaringan informnasi hasil kajian konseptual, pustaka, dan hasil-hasil penelitian di bidang pertanian, kehutanan, dan teknologi pertanian serta bidang-bidang ilmu yang relevan

JURNAL AGRITEK

Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian. Teknologi Pertanian. Kehutanan

Terakreditasi Ditjen Dikti No.050/0/1/98; No.395/DIKTI/KEP/2000; No.26/DIKTI/KEP/2005

DAFTAR ISI

No.	Judul	Hal
	POTENSI DAN PELESTARIAN ROTAN DI HUTAN LINDUNG BUKIT DINGIN KABUPATEN LAHAT PROPINSI SUMATERA SELATAN (A. Hahn PKS, Zuikifli Dahlan, dan Joni Hendra Putra).	1
2.	FLORA SEBAGAI TEMA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB INTENSIF DI FAKULTAS SASTRA UN IVERSITAS NEGERI MALANG: GAGAS AN PENGEMBANGAN PENGUSAHAAN MEDAN MAKNA BAHASA ARAB BAGI MARAS ISWA (Irhammi)	8
3.	IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK PETANI KAKAO DAN KENDALA USAHATANI SERTA PERSEPSINYA TERHADAP PERAN ASOSIASI PETANI KAKAO DI KABUPATEN PIDIE DAN PIDIE JAYA (Rita Ariani dan Setia Bud).	16
4.	STRATEGI PENANGANAN MADU DALAM MEMBERSIAPKAN USAHAPETERNAKAN LEBAH MADUBERBASIS AGROINDUSTRI (Sri Alinarti)	22
5.	PENGARUH ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA USAHATANI (Kasus Di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasilanalaya) (Ded Szg5lad dan Herartim Juningsih)	
6.	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FRAGMENTASI LAHAN SERTA STRATEGI PETANI AKIBAT FRAGMENTASI LAHAN DI SENTRA PRODUKSI PADI KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR (Afingat).	
7.	IMPACT DAN KEBIJAKAN PENANGANAN BENCANA TSUNAMI DALAM RANGKA PENGURANGAN RESIKO BENCANA DI PROVINSI JAWA TIMUR (Praptining Sukowati)	36

48

IMPLENIENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN BENCANA TSUNAMI DALAM RANGKA PENGURANGAN RESIKO BENCANA DI PROVINSI JAWA TIMUR

PRAPTINING SUKOWATI•

ABSTRAK

Peran pemerintah daerah seringkali kurang relevan antara aturan dan implementasi yang terjadi di lapangan. Akibatnya terjadi benturan antara kepentingan masyarakat, kepentingan antar daerah dan kepentingan antar stakeholder, sehingga peran pemerintah daerah menjadi kurang maksimal dan kurang efektif yang berdampak pada tidak diperhatikannya kesadaran masyarakat untuk mandiri dalam menghadapi bencana tsunami. Karena selama ini, masyarakat kurang disiapkan secara dini. Demikian pula adanya penanggulangan yang tersentral, menjadikan masyarakat lebih menggangungkan dirinya untuk menerima bantuan daripada memandirikan mereka dalam menghadapi bencana tsunami. *Jenis penelitian adalah diskriptif kualitatif, dengan rumus Slovin. teknik pengambilan sample menggunakan metode Propotional Random Sampling.*

Kata kunci: Implementasi kebijakan, mitigasi bencana.

ABSTRACT

The role of local governments are often less relevant between rules and implementation in the field. The role of local governments are often less relevant between rules and implementation in the field. As a result of any conflict between the interests of society, inter-regional interests and the interests of inter-stakeholders, so that the role of local government becomes less and less effective maximum impact on not attention to self-awareness in the face of the tsunami disaster. Because of all this, society less prepared early. Similarly, the existence of a centralized control, making the community more hung himself to accept help rather than memandirikan them in the face of the tsunami disaster. Type Qualitative research is descriptive, with Slovin formula, method of sampling techniques Propotional Random Sampling.

Keywords: Implementation of policies, disaster mitigation.

PENDAHULUAN

Permasalahan bencana tsunami di Provinsi Jawa Timur menjadi rumit karena terjadi di daerah yang kondisi masyarakatnya seringkali tidak mampu alias rentan dan lokasinya-pun jauh dari pusat pemerintahan yang sulit dicapai. Oleh sebab itu paradigma baru tentang kebijakan penanggulangan bencana tsunami, perlu segera dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Saat ini penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat, yaitu menuju masyarakat yang mampu mandiri, mampu mengenali ancaman bahaya di lingkungannya, dan mampu menolong diri sendiri merupakan langkah yang perlu segera diambil agar tercipta kesinambungan di kemudian hari bila terjadi bencana khususnya bencana tsunami.

Pada dasarnya permasalahan yang terkait dengan bencana tsunami sangatlah kompleks dan memerlukan pemikiran yang mendalam, dan berkelanjutan. Proses penyusunan dan implementasinya juga seharusnya melibatkan masyarakat, bukan sebaliknya memperlakukan masyarakat sebagai obyek

semata, dan dengan memarginalisasikan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa untuk membangun daerah bencana tsunami harus menghargai budaya lokal, yang tetap beridentitas Indonesia dan dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebenarnya skala kerusakan dapat diminimalisir apabila daerah memiliki lembaga penanggulangan bencana tsunami yang baik. Terlepas dari kenyataan bahwa bencana tsunami adalah bagian dari takdir Illahi, sehingga seringkali tidak bisa dicegah, namun manusia memiliki kekuatan akal dan pengetahuan yang semestinya bisa dimaksimalkan untuk mereduksi atau meminimalisir bahaya (*damages*) bencana tsunami.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian diskriptif kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder, data primer adalah data langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian, data primer diperoleh dari sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data dan sumber data sekunder

dari data yang dibutuhkan. Data sekunder diklasifikasikan menjadi dua, yaitu internal data yaitu data tersedia tertulis pada sumber data sekunder dan eksternal data yaitu data yang diperoleh dari sumber luar.

Dalam kajian ini terdapat beberapa sampel hasil manajemen bencana yang telah dilakukan di Indonesia. Untuk sampel penelitian berupa strategi manajemen bencana yang telah dilakukan oleh lembaga pelaksana dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Lembaga pelaksana adalah lembaga yang telah ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan, mengelola, menangani program-program bencana di Indonesia. Sedangkan dalam pengambilan sampel penelitian terhadap korban bencana dengan menggunakan metode sampel acak sederhana (*simple random sampling*), dengan teknik analisis *Strauss & Corbin*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telah disahkannya UU Penanggulangan Bencana ataupun aturan terpadu sejenis yang berkekuatan hukum untuk menangani bencana (semacam *disaster management act*), namun kenyataannya belum dilaksanakan secara konsisten, kita masih melihat banyak manajemen bencana yang kurang profesional, sesuai asas dalam penyelenggaraan *desentralisasi, dekonsentrasi dan devas pembantuan* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu wilayah yang rawan bencana tsunami (± 8 Kabupaten/Kota). Tidak ada alternatif lain bagi Pemerintah Daerah Jawa Timur, saat ini selain merumuskan strategi kebijakan pengurangan resiko bencana tsunami, yang komprehensif dan integratif. Yang terpenting dari kebijakan pengurangan resiko bencana tsunami, adalah, adanya suatu langkah konkrit dalam mengendalikan bencana tsunami. Pengendalian tersebut bisa dimulai dengan membangun kesadaran kritis masyarakat, dimana dituntut untuk segera menciptakan proses perbaikan total atas pengurangan resiko bencana, dan penegasan untuk memunculkan lembaga kebencanaan yang bertumpu pada kearifan lokal dalam rangka pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Resiko **Bencana Tsunami**. Risiko merupakan fungsi dari ancaman, kerentanan dan kemampuan. Unsur-unsur resiko bencana berupa ancaman bahaya (*hazard*),

kerentanan (*vulnerability*) dan kemampuan (*capacity*) yang dihadapi oleh wilayah tersebut.

Ancaman Bahaya (*hazard*). Dilihat dari potensi bencana yang ada, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah potensi bahaya (*hazard potency*) bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abstrak yang tinggi. Dimana seperti juga potensi bencana yang ada di Indonesia, potensi bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi yang ada di Provinsi Jawa Timur juga dikelompokkan menjadi 2 kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama (*main hazard*) dan potensi bahaya ikutan (*collateral hazard*). Potensi bahaya utama (*main hazard potency*) ini dapat dilihat antara lain pada peta rawan bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur adalah wilayah dengan zona-zona gempa yang rawan, peta kerentanan bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi.

Kerentanan. Kerentanan adalah keadaan atau sifat/perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman yang dalam hal ini bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi, yang dapat berupa: 1). Kerentanan Fisik Secara fisik bentuk kerentanan yang dimiliki masyarakat berupa daya tahan menghadapi bahaya tertentu, misalnya: kekuatan bangunan rumah bagi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi, 2). Kerentanan Ekonomi Kemampuan ekonomi suatu individu atau masyarakat sangat menentukan tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Pada umumnya masyarakat atau daerah yang miskin atau kurang mampu lebih rentan terhadap bahaya, karena tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk melakukan upaya pencegahan atau mitigasi bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi, 3). Kerentanan Sosial Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Dari segi pendidikan, kekurangan pengetahuan tentang risiko bahaya dan bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi akan mempertinggi tingkat kerentanan, demikian pula tingkat kesehatan masyarakat yang rendah juga mengakibatkan rentan menghadapi bahaya, 4). Kerentanan Lingkungan Lingkungan hidup suatu masyarakat sangat mempengaruhi kerentanan. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi akan selalu merasa terancam bahaya. Penduduk yang tinggal di lereng pantai, perbukitan atau pegunungan rentan terhadap ancaman bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi dan sebagainya.

Kemampuan. Kemampuan di sini diartikan sebagai kesiapan masyarakat dalam menghadapi bahaya bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi. Kemampuan merupakan kebalikan dari kerentanan, semakin mampu masyarakat menghadapi bahaya bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi maka semakin kecil kerentanannya. Kemampuan dapat diukur dari tingkat kesiapan dengan beberapa parameter antara lain pengetahuan, kelembagaan, mekanisme kerja dan sumberdayanya. Jika di suatu daerah beluair mempunyai unsur parameter tersebut sama sekali, maka kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi dikatakan masih rendah.

Akumulasi dari faktor-faktor bahaya, kerentanan dan kemampuan akan dapat memposisikan masyarakat dan daerah yang rawan bencana tsunami, cuaca & gelombang ekstrim, abrasi pada tingkatan risiko yang berbeda. Resiko merupakan fungsi dari bahaya (*hazard*), kerentanan dan kemampuan. Semakin tinggi ancaman bahaya di suatu daerah, maka semakin tinggi risiko daerah tersebut terkena bencana. Demikian pula semakin tinggi tingkat kerentanan masyarakat atau penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Tetapi sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemampuan masyarakat, maka semakin kecil risiko yang dihadapinya. Untuk menentukan prioritas risiko bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi yang akan ditangani maka diperlukan pengenalan tingkat risiko bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi secara makro.

Bencana adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, yang terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, dimana kejadian tersebut di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdayanya.

Pendapat lainnya, bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri (ISDR, 2004). Menurut UU No. 27/2007 tentang pedoman Penyediaan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan disebutkan bahwa bencana adalah, peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, ulah/perbuatan manusia, dan perpaduan antara alam dan ulah/perbuatan manusia serta penyebab lainnya, yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Tsunami berasal dari bahasa Jepang. "*tsu*" berarti pelabuhan, "*nami*" berarti gelombang sehingga secara umum diartikan sebagai pasang Taut yang besar di Pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang Taut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar taut. Gangguan impulsif tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsor. Kriteria kawasan rawan tsunami adalah pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami. Bencana tsunami berarti bencana gelombang pasang yang timbul akibat terjadinya gempa bumi di taut, letusan gunung api bawah taut atau longsor di taut. Namun tidak semua fenomena tersebut dapat memicu terjadinya tsunami.

Syarat utama timbulnya tsunami adalah adanya deformasi (perubahan bentuk yang berupa pengangkatan atau penurunan blok batuan yang terjadi secara tiba-tiba dalam skala yang luas) di bawah taut. Terdapat empat faktor pada gempa bumi yang dapat menimbulkan tsunami, yaitu: 1). Pusat gempa bumi terjadi di Taut, 2). Gempa bumi memiliki magnitudo besar, 3). Kedalaman gempa bumi dangkal, dan 4). Terjadi deformasi vertikal pada lantai dasar Taut. Gelombang tsunami bergerak sangat cepat, mencapai 600-800 km per jam, dengan tinggi gelombang dapat mencapai 20 m.

Dalam pasal I UU No 24 Tahun 2007, disebutkan yang dimaksud dengan bencana Tsunami, adalah salah satu bentuk bencana alam karena gempa bumi yang terjadi di taut (gelombang laut/tsunami), terutama pada gempa yang terjadi di taut dalam yang diikuti deformasi bawah Taut, demikian pula letusan gunung berapi juga dapat menimbulkan gelombang pasang. Bencana gempa bumi dan tsunami umumnya menimbulkan kerugian harta benda dan jiwa dalam skala besar dan butuh waktu yang lama untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini cukup memprihatinkan karena peristiwa yang terjadi dalam waktu yang relatif cukup singkat dapat menghancurkan bangunan dan infrastruktur yang merupakan hasil pembangunan selama puluhan tahun.

Dan informasi Stasiun Geofisika Provinsi Jawa Timur, besaran, frekuensi, jenis dan dampak buruk bencana akhir-akhir ini semakin kompleks dan meningkat. Stasiun Geofisika berfungsi memantau aktivitas bumi, serta untuk mengetahui gejala terjadinya gempa. Di Jatim ada tiga stasiun pencatat gempa, tepatnya di Tretes, Karangates dan di Sawahan Nganjuk. Stasiun Geofisika berfungsi memantau aktivitas bumi, serta untuk mengetahui gejala terjadinya gempa. Di Jatim ada tiga stasiun pencatat gempa, tepatnya di Tretes, Karangates dan di Sawahan Nganjuk.

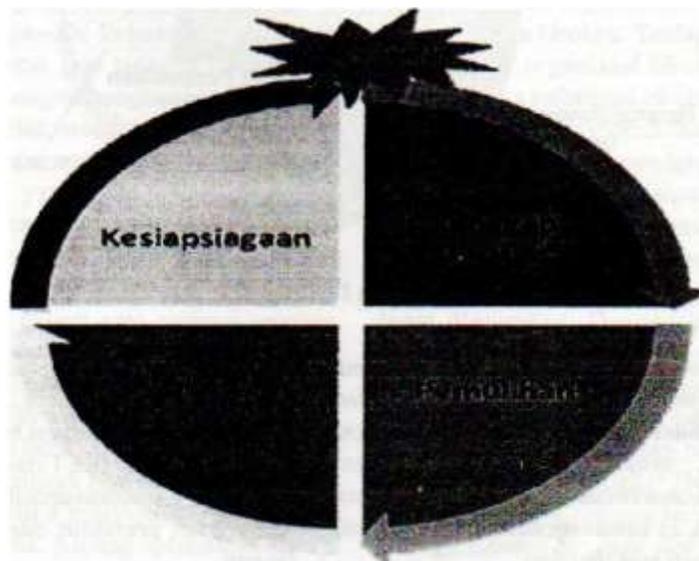
Daerah yang pernah mengalami gempa bumi terbesar di Jatim yaitu di Banyuwangi dengan berkekuatan 5,9 skala richter (SR) terjadi pada 2 Juni 1994.

Gempa juga pernah terjadi di daerah Malang, Blitar, Mojokerto dan Tulungagung. Masyarakat yang bermukim di sepanjang pesisir selatan pulau Jawa sudah diingatkan, khususnya Jawa Timur untuk mewaspadai dan siaga penuh terhadap munculnya tsunami. Karena pesisir selatan Jawa Timur dan Bali masuk dalam zona bahaya yang berpotensi tsunami. Sebab di wilayah tersebut terdapat patahan panjang mulai dari Sumatera.

Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur harus terus meningkatkan koordinasi dengan pihak BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) Tretes, selain segera merumuskan dan menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Walaupun gempa sangat sulit diprediksi karena

datangnya secara tiba-tiba. Namun tetap harus bisa mengimbau masyarakat yang tinggal di pesisir selatan Jawa Timur agar segera mengungsi ke dataran yang lebih tinggi, jika tiba-tiba air laut surut. Semakin meningkatnya kejadian bencana salah satu penyebabnya adalah adanya faktor kerentanan yang tidak terkendali.

Penanggulangan bencana tsunami, adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan sejak sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi yang dimulai dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Rangkaian kegiatan tersebut apabila digambarkan dalam siklus penanggulangan bencana tsunami, adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus Penanggulangan Bencana

Pada dasarnya rangkaian kegiatan Rencana Penanggulangan Bencana tsunami, ini dapat dibagi dalam empat tahapan yakni: 1). Tahap Pencegahan dan Mitigasi, 2). Tahap Kesiapsiagaan, 3). Tahap Tanggap Darurat, 4). Tahap Pemulihan

Siklus bencana yang digambarkan di atas, sebaiknya tidak dipahami sebagai suatu pembagian tahapan yang tugas, dimana kegiatan pada tahap tertentu akan berakhir pada saat tahapan berikutnya dimulai. Akan tetapi harus dipahami bahwa setiap waktu semua tahapan dilaksanakan secara bersama-sama dengan porsi kegiatan yang berbeda. Misalnya pada tahap pemulihan, kegiatan utamanya adalah pemulihan tetapi kegiatan pencegahan dan mitigasi juga sudah dimulai untuk mengantisipasi bencana tsunami yang akan datang.

Dalam setiap tahapan tersebut di atas, agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap

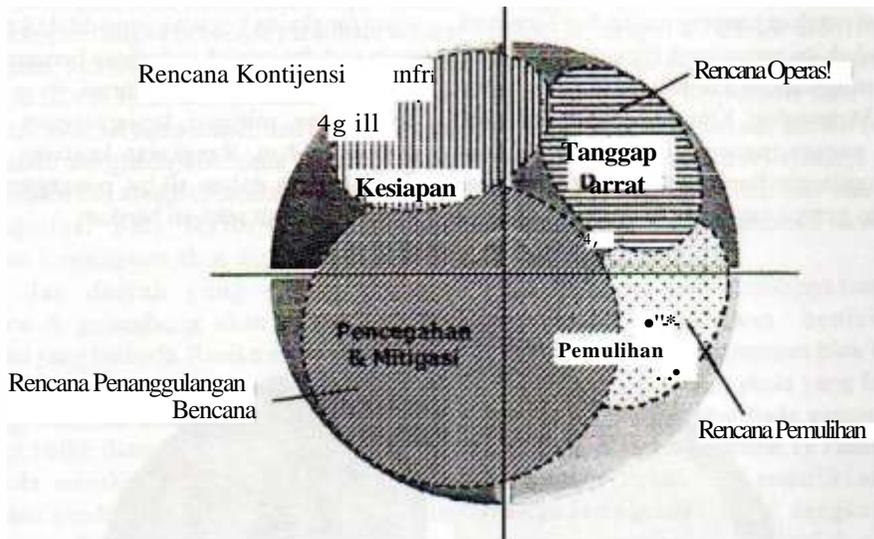
tahapan. 1). Pada Tahap Pencegahan dan Mitigasi, dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana tsunami, (*Disaster Management Plan*) atau sering disebut juga Rencana Kesiapan (*Disaster Preparedness Plan*); 2). Pada Tahap Kesiapsiagaan, dilakukan Penyusunan Rencana Kedaruratan (*Emergency Response Plan*) atau lebih spesifik jika untuk menghadapi suatu ancaman adalah Rencana Kontinjensi (*Contingency Plan*); 3). Pada Tahap Tanggap Darurat dilakukan pengaktifan Rencana Operasi (*Operation Plan*) yang merupakan operasionalisasi dari Rencana Kedaruratan atau Rencana Kontinjensi; 4). Pada Tahap Pemulihan dilakukan Penyusunan Rencana Pemulihan (*Recovery Plan*) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana Tsunami, dititikberatkan pada Rencana Kesiapan (*Disaster*

Preparedness) yang disusun pada saat keadaan normal yakni pada tahap pencegahan dan mitigasi. Disamping kegiatan yang meliputi dari 4 (empat) tahap seperti gambar di atas, dalam penanggulangan bencana tsunami, juga direncanakan semua kegiatan untuk semua jenis

ancaman (*hazard*) yang dihadapi oleh suatu wilayah dan kerentanan (*vulnerability*).

Apabila digambarkan ke empat jenis rencana dalam penanggulangan bencana tsunami, adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Jenis Rencana dalam Penanggulangan Bencana Tsunami

Oleh karena lingkup kegiatan luas dan jenis ancaman cukup banyak, maka para pelaku (*stakeholder*) yang terlibat juga akan lebih banyak. Berdasarkan kondisi tersebut, maka sifat dari Rencana Penanggulangan Bencana tsunami, ini adalah: 1). Lintas tahapan (*multi phase*), 2). Lintas ancaman (*multi hazard*), 3). Lintas pelaku (*multi stakeholder*)

Rencana Penanggulangan Bencana Tsunami. Rencana Penanggulangan Bencana Tsunami, merupakan salah satu perwujudan fungsi Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bila disesuaikan dengan paradigma baru, maka penanggulangan bencana tsunami, adalah suatu pekerjaan terpadu yang melibatkan masyarakat secara aktif. Tentunya pendekatan terpadu semacam ini menuntut koordinasi yang lebih baik diantara semua pihak, baik dari sektor Pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat, badan-badan internasional dan sebagainya. Tersedianya sejumlah besar kebijakan penanggulangan bencana tsunami, yang komprehensif dan integratif.

Memang kesadaran dalam menanggulangi bencana tsunami, ini dirasakan belum sepenuhnya disadari oleh seluruh elemen masyarakat. Saat ini terlihat bahwa penanggulangan bencana tsunami, masih terkesan tidak siap dan seolah olah antisipasi hanya dilakukan setelah terjadinya bencana. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk terus membenahi kebijakan penanggulangan bencana tsunami, yang tentunya tidak hanya melibatkan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga tetapi seluruh elemen masyarakatnya. Dalam implementasinya penanggulangan bencana tsunami, dilakukan utamanya oleh pemerintah Jawa Timur dan atau pemerintah daerah municipal. Kemudian apabila skalanya terlalu besar, maka pemerintah prefektur dan nasional baru akan turun tangan.

Tuntutan reformasi birokrasi adalah adanya perubahan paradigma pembangunan dan per Undang-Undang otonomi daerah (1999, 2004), derasnya tuntutan masyarakat agar pemerintah menumbuhkan *good governance*, dan semakin tajamnya kritik masyarakat terhadap kinerja birokrasi yang dianggap rendah, lambat, kurang bertanggungjawab, dan kurang profesional terutama dalam penanganan layanan publik, termasuk disini penanganan bencana dimana semua aparat pemerintah diuntut memiliki *sense of crisis* dan tanggap terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat. Karena itu, untuk mewujudkan atau bahkan mempercepat terwujudnya *good governance* di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, maka semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat, dapat menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good public governance*) di lingkungan masing-masing, termasuk disini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur. Karena, *good governance* tidak akan terwujud jika tidak adanya dukungan dan sinergi antar tiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Untuk meningkatkan kinerja atau keberhasilan penanggulangan bencana Tsunami, di Provinsi Jawa Timur, di satu sisi, pengalaman penanganan bencana di masa lampau perlu terus disempurnakan dan diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan, contohnya, paradigma penanggulangan bencana Tsunami, yang bersifat parsial dan/atau sektoral perlu diubah menjadi paradigma penanggulangan bencana yang menekankan pada keseluruhan manajemen resiko, upaya melindungi hak azasi rakyat, dan upaya melibatkan seluruh komponen masyarakat, dan di sisi yang lain, untuk meningkatkan kemampuan menghadapi dan/atau mengurangi resiko dari bencana Tsunami, di Jawa Timur. Selanjutnya adanya anggapan bahwa selama belum ada aturan baru, pada umumnya masih menggunakan pedoman, terkait dengan manajemen penanganan bencana dalam menjawab kebutuhan terhadap perencanaan logistik untuk fase tanggap darurat pada bencana, yaitu dengan mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan masalah *multi-commodity network flow* dengan masalah rutin sarana transportasi. Fungsi tujuan dari kebijakan yang dikembangkan adalah meminimasi jumlah permintaan yang tidak terpenuhi untuk semua komoditas sepanjang horison perencanaan". Kondisi seperti ini sangat perlu sedini mungkin untuk ditindak lanjuti guna mitigasi bencana, khususnya bencana tsunami, terlaksana dengan baik di daerah rawan bencana tsunami, di Provinsi Jawa Timur.

Menjadi masalah kompleks, bahkan menjadi isue publik, bahwa kinerja birokrasi disinyalir masih relatif rendah dan belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan dan pi lihan publik, ketika melaksanakan tugasnya sebagai manajemen publik. Kurang optimalnya kinerja birokrasi disebabkan beberapa hal, yang bisa berasal dari lingkungan internal, lingkungan eksternal ataupun sifat watak yang melekat lama pada birokrasi itu sendiri. *Sense of responsibility* menuntut birokrasi tidak sekedar mau dan mampu bertanggung jawab, tetapi juga mau dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diamanatkan kepada mereka. Penyelenggaraan manajemen publik merupakan salah satu fungsi penting pemerintah di samping distribusi, regulasi, dan proteksi dalam kerangka mewujudkan atau bahkan mempercepat

terwujudnya *good governance* di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu maka semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat, dapat menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan masing-masing. Karena, *good governance* tidak akan terwujud jika tidak adanya dukungan dan sinergi antar tiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Reformasi Birokrasi diarahkan pada perubahan sistim birokrasi dari yang berorientasi kepentingan negara kepada birokrasi berorientasi pelayanan masyarakat (*public service*). Perubahan dimaksud adalah untuk menciptakan birokrasi dan sistim pemerintahan yang terus menerus berkreasi, berinovasi dan secara kontinue memperbaiki kualitas tanpa tekanan. Perubahan dimaksudkan kiranya dapat menciptakan dorongan untuk melakukan perbaikan di dalam diri para birokrat. Terdapat banyak cara memotret transformasi organisasi birokrasi pelayanan publik. Dalam rangka reformasi birokrasi tersebut, Osborne & Plastrik (1996) mengidentifikasi lima strategi dasar yang disebut sebagai pendongkrak utama perubahan birokrasi pemerintahan dalam pelayanan publik yang disingkat Five Cs'. Untuk memahami mengapa birokrasi pemerintahan gagal mengembangkan kinerja pelayanan publik yang baik terdapat berbagai penjelasan yang dapat digunakan. Dengan menggunakan metafora biologi mengenai kelima strategi DNA (kode genetika) dalam tubuh birokrasi pemerintahan dapat mempengaruhi kapasitas dan kapabilitas perilaku birokrasi pemerintahan menyikapi penyelenggaraan pelayanan publik. Kelima strategi dimaksud disingkat *The Five Cs* ' yang meliputi: *Core Strategy*, *Consequences Strategy*, *Customer Strategy*, *Control Strategy*, dan *Control Strategy*. Kelima unsur tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lain dalam membentuk perilaku birokrasi dalam pelayanan publik. Pengelolaan kelima strategi DNA dalam sistim kehidupan birokrasi, akan menentukan kualitas sistim pelayanan berdasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, keadilan, kejujuran, keterbukaan akuntabilitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Untuk meningkatkan kinerja atau keberhasilan penanggulangan bencana Tsunami, di Provinsi Jawa Timur, di satu sisi, pengalaman penanganan bencana di masa lampau perlu terus disempurnakan dan diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan, contohnya, paradigma penanggulangan bencana Tsunami, yang bersifat parsial dan/atau sektoral perlu diubah menjadi paradigma penanggulangan bencana yang menekankan pada keseluruhan manajemen resiko, upaya melindungi hak azasi rakyat, dan upaya melibatkan seluruh komponen masyarakat, dan di sisi yang lain, untuk meningkatkan kemampuan menghadapi dan/atau mengurangi resiko dari bencana Tsunami, di Jawa Timur. Selanjutnya adanya anggapan bahwa selama belum ada aturan baru, pada umumnya masih menggunakan pedoman, terkait dengan manajemen penanganan bencana dalam menjawab kebutuhan terhadap perencanaan logistik untuk fase tanggap darurat pada bencana, yaitu dengan mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan masalah *multi-commodity network flow* dengan masalah rutin sarana transportasi. Fungsi tujuan dari kebijakan yang dikembangkan adalah meminimasi jumlah permintaan yang tidak terpenuhi untuk semua komoditas sepanjang horison perencanaan". Kondisi seperti ini sangat perlu sedini mungkin untuk ditindak lanjuti guna mitigasi bencana, khususnya a bencana tsunami, terlaksana dengan baik di daerah rawan bencana tsunami, di Provinsi Jawa

Menjadi masalah kompleks, bahkan menjadi issue publik. bahwa kinerja birokrasi disinyalir masih relatif rendah dan belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan dan pilihan publik, ketika melaksanakan tugasnya sebagai manajemen publik. Kurang optimalnya kinerja birokrasi disebabkan beberapa hal, yang bisa berasal dari lingkungan internal, lingkungan eksternal ataupun sifat, watak yang melekat lama pada birokrasi itu sendiri. *Sense of responsibility* menuntut birokrasi tidak sekedar mau dan mampu bertanggung jawab, tetapi juga mau dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diamanatkan kepada mereka. Penyelenggaraan manajemen publik merupakan salah satu fungsi penting pemerintah di samping distribusi, regulasi, dan proteksi dalam kerangka mewujudkan atau bahkan mempercepat

terwujudnya *good governance* di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu maka semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat, dapat menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan masing-masing. Karena, *good governance* tidak akan terwujud jika tidak adanya dukungan dan sinergi antar tiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Reformasi Birokrasi diarahkan pada perubahan sistem birokrasi dari yang berorientasi kepentingan negara kepada birokrasi berorientasi pelayanan masyarakat (*public service*). Perubahan dimaksud adalah untuk menciptakan birokrasi dan sistem pemerintahan yang terus menerus berkreasi, berinovasi dan secara kontinue memperbaiki kualitas tanpa tekanan. Perubahan dimaksudkan kiranya dapat menciptakan dorongan untuk melakukan perbaikan di dalam diri para birokrat. Terdapat banyak cara memotret transformasi organisasi birokrasi pelayanan publik. Dalam rangka reformasi birokrasi tersebut, Osborne & Plastrik (1996) mengidentifikasi lima strategi dasar yang disebut sebagai pendongkrak utama perubahan birokrasi pemerintahan dalam pelayanan publik yang disingkat Five Cs'. Untuk memahami mengapa birokrasi pemerintahan gagal mengembangkan kinerja pelayanan publik yang baik terdapat berbagai penjelasan yang dapat digunakan. Dengan menggunakan metafora biologi mengenai kelima strategi DNA (kode genetika) dalam tubuh birokrasi pemerintahan dapat mempengaruhi kapasitas dan kapabilitas perilaku birokrasi pemerintahan menyikapi penyelenggaraan pelayanan publik. Kelima strategi dimaksud disingkat *The Five Cs'* yang meliputi: *Core Strategy*, *Consequences Strategy*, *Customer Strategy*, *Control Strategy*, dan *Control Strategy*. Kelima unsur tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lain dalam membentuk perilaku birokrasi dalam pelayanan publik. Pengelolaan kelima strategi DNA dalam sistem kehidupan birokrasi, akan menentukan kualitas sistem pelayanan berdasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, keadilan, kejujuran, keterbukaan akuntabilitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. The Five Cs' Changing Government's DNA

<u>Level</u>	<u>Strategi</u>	<u>Approaches</u>
Purpose	Core Strategy	Clarity of Purpose Clarity of Role Clarity of Direction Managed Competition Enterprise Management Performance Customer Choice Competitive Choice
Incentives	Consequences Strategy	Customer Quality Assurance Organizational Empowerment Employee Empowerment Community Empowerment
Accountability	Customer Strategy	Breaking 1-bit Touching Hearts Winning Minds
Power	Control Strategy	
Culture	Culture Strategy	

Sumber. Osborne & Plastrik (1997)

Secara umum, tuntutan reformasi berupa penciptaan *good corporate governance* di sektor dunia usaha atau swasta, penciptaan *good public governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dan pembentukan *good civil society* atau masyarakat sipil yang mampu mendukung terwujudnya *good governance*. Sejak terjadinya krisis multidimensi beberapa tahun tersebut, masyarakat telah terbiasa dengan berbagai ulasan, diskusi dan analisis mengenai berbagai sebab dan akibat krisis tersebut.

Salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensi yang kita alami tersebut adalah karena buruknya atau salah kelola dalam penyelenggaraan tata pemerintahan (*poor or bad governance*) yang dalam hal ini adalah kebijakan penanggulangan bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi, yang antara lain diindikasikan oleh 3 (tiga) permasalahan utama di dalam birokrasi pemerintahan yaitu: 1). Terjadinya tindakan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme); 2). Rendahnya kinerja aparatur; dan 3). Rendahnya kinerja pelayanan kepada publik atau masyarakat.

Ketiga permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh belum optimalnya penyempurnaan birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan ketika itu, yang ditandai dengan: 1). Masih lemahnya penerapan prinsip-prinsip *good public governance*, 2). Belum diterapkannya sistem manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja yang antara lain dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan; dan 3). Masih rendahnya gaji pegawai negeri.

Sehingga diperlukan Reformasi Birokrasi, karena: 1). Peranan strategis dari birokrasi dalam mewujudkan visi dan misi bangsa (melindungi bangsa dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara

ketertiban dunia), 2). Krisis multi dimensi dimulai sejak Orde Baru, puncaknya pada tahun 1997 dan masih berkepanjangan, termasuk krisis moral (Indonesia paling lamban keluar dari krisis), 3). Peringkat *Indeks Persepsi Korupsi (IPK)* Indonesia teratas di Asia, 4). Millenium Development Goals (Deklarasi PBB No. 55/2000) dimana setiap negara anggota PBB harus mengurangi warga masyarakat miskin dan pengangguran sebesar 50% pada akhir tahun 2015, 5). Masih tingginya jumlah penduduk miskin (37,17 juta atau 16,6%) dan jmlh pengangguran terbuka (10,55 juta atau 9,8%) th 2007, 6). Birokrasi yg ada dewasa ini belum berperan dalam meningkatkan investasi (Menurut IFC, *doing business* di Indonesia berada pada peringkat 135 dari 175 negara yg disurvei), 7). Peranan strategis dari birokrasi dalam mewujudkan visi dan misi bangsa (melindungi bangsa dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia), 8). Pelaksanaan reformasi birokrasi selama ini belum memenuhi tuntutan masyarakat, belum terencana secara sistemik, komprehensif dan berdurasi jangka panjang (setiap ganti Pemerintah kebijakan reformasi birokrasi dimulai dari awal kembali).

Dengan demikian Provinsi Jawa Timur diharapkan agar dapat bekerja lebih profesional dengan mengedepankan tanggungjawab dan akuntabilitas publik dengan menekan sekecil mungkin pemborosan penggunaan anggaran dan sekaligus menegakkan perundang-undangan sebagai landasan tupoksi kebijakan penanggulangan bencana tsunami. Salah satu aksi yang perlu dibenahi dalam kebijakan penanggulangan bencana tsunami di Provinsi Jawa Timur adalah pelayanan dasar atau minimal yang perlu disediakan untuk masyarakat di daerah rawan bencana tsunami.

Pelayanan Dasar dalam Penanggulangan Bencana Tsunami. Pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. (Permendagri No. 79 tahun 2007). Mengacu pada aturan tersebut, maka dalam menangani bencana, tentunya tidak terlepas dengan adanya peran birokrasi terhadap pelayanan publik. Baik pada masa sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana tsunami. Peran pelayanan publik sangat dibutuhkan untuk mengatasi segala macam persoalan yang terjadi. Sehingga dibutuhkan standarisasi pelayanan minimal di setiap daerah sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah rawan bencana tsunami.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dalam wujud pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab telah menjadikan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka perlu adanya penataan ulang berbagai elemen dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka manifestasi pelaksanaan otonomi daerah. Karena pada dasarnya tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran atau tujuan yang diinginkan diperlukan upaya pembinaan aparatur pemerintah daerah, sehingga dapat bekerja secara profesional dan manajemen pelayanan umum (*public service*) dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Sehingga yang perlu dikedepankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah daerah mampu membangun, meningkatkan dan mendayagunakan kelembagaan daerah yang kondusif, sehingga dapat mendesain standart pelayanan publik yang mudah, murah dan cepat dalam penanggulangan bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi.

Pelayanan Publik (*Public Service*) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari satu negara kesejahteraan (*welfare state*). Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Dalam hal penanggulangan bencana tsunami, ini, terciptanya kualitas pelayanan tentunya akan menciptakan efektivitas dalam kinerja penanganan bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi, yang berdampak pada kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat korban bencana atau masyarakat di daerah

rawan bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi. Adanya penanggulangan yang baik terhadap masyarakat korban bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi akan dapat mendukung tercapainya indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah begitu pula sebaliknya.

Dalam hubungan inilah pelayanan sebagai salah satu fungsi pemerintah, pada tingkat operasionalnya harus dapat melindungi dan memenuhi tuntutan dan keh"tuhan masyarakat. Memenuhi dan melindungi tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari wujud pelayanan dimaksudkan agar masyarakat dapat terpuaskan. Itulah sebabnya untuk memperbaiki kinerja Pemerintahan di Amerika Serikat, dari sepuluh formula yang dikemukakan oleh *Osborne dan Gaebler (1996:191)*, satu diantaranya adalah pemerintah sebagai pelayanan masyarakat haruslah lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan, bukan memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi sendiri. Hal ini berarti upaya untuk memiraskan masyarakat terkait dengan misi pemerintahan yaitu dengan tidak lagi bertumpu pada kekuasaan melainkan telah bergeser pada pelayanan. Pemerintahan, seperti dikatakan *Mac Iver (192: 101)* adalah demi untuk mereka yang diperintah dan bukan demi yang memerintah, maka semua aktivitasnya pada umumnya hanya ditujukan pada kesejahteraan umum. Dinyatakannya pula bahwa dalam negara yang moderen konsepsi negara yang tadinya dalam mata mereka yang menjadi rakyatnya semata-mata alat kekuasaan, kini telah menjadi suatu badan pelayanan. Sebagai suatu badan pelayanan, negara perlu diurus, diatur dan dikelola agar dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas tanggung jawab akan semua itu, bila disimak dari teori "Kontrak Sosial" *JJ Rousseau*, terletak pada pemerintah. Dengan demikian penekanan pada tanggung jawab harus dilihat, hal ini penting karena sebagaimana dikatakan Rasyid (1997:11): manifestasi dari suatu pemerintahan adalah tanggung jawab yang pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Namun pertanggung jawaban yang dikehendaki saat ini dari pelayanan pemerintah, termasuk di dalamnya pelayanan dalam hal penanggulangan bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi di daerah rawan bencana Provinsi Jawa Timur. Pelayanan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana tsunami, cuaca, gelombang ekstrim dan abrasi adalah pertanggung jawaban yang bukan saja bersifat internal (orientasi ke dalam organisasi) tetapi yang lebih penting adalah pertanggung jawaban eksternal (orientasi ke pelanggan / masyarakat).

Terkait dengan kebijakan pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana tsunami, yang harus dilakukan oleh Prpviai,334 a Tin uvn aka strdidEasi palayanan m inin al hams ciitetzpkan. Keberhasilan dalam melayani masyarakat, atau *Goals* daripada pelayanan publik adalah apa yang dinamakan dengan

Good Governance. Pemerintah yang baik (*good governance*) menurut pema-haman Kei Ho AT (2002) adalah pemerintah yang digerakkan oleh suatu kesadaran baru dan sikap responsif dari para pengguna jasa (*government is driven by a new awareness of and responsiveness to customer*). Untuk mengelola pemerintahan secara baik dan dapat memperkecil biaya operasional pemerintah (*cost of government*) maka perlu diperhatikan tiga hal sebagai berikut: 1). Mereduksi ukuran dan jumlah lembaga pemerintahan, program dan staf (*downsizing*), 2). Mempermudah prosedur (*streamlining*), 3). M e r e f o r m a s i lembaga-lembaga secara struktural agar dapat menjalankan misinya dengan baik (*re-structuring*)

Argumentasi bahwa manajemen pemerintahan sebagai proses pencapaian tujuan pemerintah yang dilakukan oleh aparat perintah, aparat negara di masyarakat harus memperhatikan prinsip umum manajerial pemerintahan sebagai berikut: 1). Adanya pembagian kerja, 2). Kewenangan dan tanggungjawab, 3). Mekanisme kerja yang jelas, 4). Penghargaan terhadap setiap anggota, 5). Etos kerja yang tinggi, 6). Penyesuaian terhadap lingkungannya sosial dan lingkungannya fisik, 7). Budaya kerja yang dilandasi nilai kejujuran yang tinggi, 8). Antisipatif.

Pemerintah daerah harus mampu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk disini adalah permasalahan penanggulangan bencana tsunami. Dengan demikian, terwujudnya *good public governance* tidak saja akan mendorong kinerja birokrasi yang semakin baik tetapi lebih dari itu dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan berbagai program pembangunan termasuk kebijakan penanggulangan bencana tsunami. Dalam rangka untuk mengurangi jumlah penduduk miskin (*poverty alleviation*). Sebaliknya, tidak diterapkannya *good public governance* dapat mengakibatkan tetap buruknya kinerja birokrasi publik dan pada akhirnya dapat menghambat tercapainya keberhasilan berbagai program pembangunan. Sehingga membangun *good public governance* merupakan program strategis yang harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan serta memerlukan dukungan dari semua unsur dalam suatu pemerintahan.

SIMPULAN

Penanggulangan bencana bertujuan untuk mengurangi risiko dan menekan dampak bencana terhadap masyarakat. Untuk itu kebijakan penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, agar dapat menjamin terselenggaranya kebijakan penanganan bencana yang terarah, terencana, terpadu, dan terkoordinasi, serta menyeluruh.

Namun kebijakan penanganan bencana akan dapat berjalan baik jika masyarakat mengerti dan sadar akan posisinya. Kesadaran ini memungkinkan terjadinya perbedaan perilaku masyarakat pada masing-masing kawasan dalam mensikapi bencana alam tersebut. Sehingga diperlukan langkah dan strategi pendekatan dalam rangka mengurangi resiko terjadinya bencana yang terpola pada budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakornas PBP, 2001. Keputusan Presiden RI. No. 3 Tahun 2001. Sekretariat Bakornas PBP. Jakarta.
- Djoko Kirmanto, 2002, Kebijakan Penanggulangan Bencana, Pustekim, Bandung.
- Departemen Pekerjaan Umum, 2002, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung ,SNI 03 1726 2002 (Revisi), Jakarta.
- Dwi Nur Handoko, 2006, Model Penanganan Bencana Banjir, Seminar dan Workshop,LPPM, UGM Yogyakarta.
- Dicky R Munaf, 2005, Model Interkoneksi Pencegahan Dini Bencana Alam, Pusat Studi Bencana UGM Yogyakarta.
- Harsha AR Ratnasooriya dkk, *Post Tsunami Recovery Process in Srilanka*, 2006, Seminar dan Workshop, FISIPOL UGM Yogyakarta.
- Kausar, 2007, *Manajemen Bencana*, Depdagri-Dirjen PUM, Jakarta.
- Khoiril Huda Naohiko dkk, *Rehabilitation of Urban Settlements in the Early Reconstruction Stage after a Tsunami, Manajemen Bencana: Belajar dari Pengalaman Aceh*, UGM Yogyakarta.
- Lorna P Victoria, 2005, *Community Based Approaches to Disaster Mitigation*, Canadia Journal of Fisheries and Aquatic Science.No 54
- Munaf DR, 2007. *Model Interkoneksi Pencegahan Dini Bencana Alam*. Jakarta, Jurnal Sosioteknologi Edisi 10 Tahun 6, April 2007.
- Moh Roem, 2007, *Urusan Pemerintah Umum Bidang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana*, Majalah Dirjen PUM-Depdagri, Jakarta, 1 Januari-30 Juni 2007.
- Makalah Seminar Sehari, *Reconstruction and Reconciliation for Aceh: Where to Go?*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 22 Pebruari.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana
- Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866)
- Rahmat Agus, 2006, *Menuju Birokrasi Penanganan Bencana yang Integratif*, Inovasi Online, Vo18/X111/Nov/2006.
- Raschky PA, *Institutions and The Losses from Natural Disasters*, 2007, Center for Natural Hazard Management, Innsbruck, Austria
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).